

PENGADILAN AGAMA BANGGAI

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2017

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kec. Banggai Tengah

Kab. Banggai Laut - Sulawesi Tengah 94791

Telp. 0462-2705706 Fax. 0462-21544

e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2017

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Ki Hajar Dewantara, Banggai

Telp. 0462-2705706 Fax. 0462-21544

Banggai Laut - Sulawesi Tengah 94791

e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Banggai adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banggai mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Banggai. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Banggai Laut, 14 Juli 2017
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

SABRIN, S.Ag
NIP. 197310052002121005

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	8
III. Laporan Operasional	11
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	13
V. Catatan atas Laporan Keuangan	15
A. Penjelasan Umum.....	15
A.1. Dasar Hukum	15
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Banggai.....	16
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	17
A.4. Basis Akuntansi.....	17
A.5. Dasar Pengukuran	18
A.6. Kebijakan Akuntansi	18
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	26
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	26
B.2. Belanja.....	27
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	32
C.1. Aset Lancar	32
C.2. Aset Tetap	34
C.3. Aset Lainnya	38
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	40
C.6. Ekuitas	41
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	42
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	42

D.2.	Beban Pegawai	42
D.3.	Beban Persediaan.....	43
D.4.	Beban Jasa	44
D.5.	Beban Pemeliharaan	44
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	45
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	45
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	46
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	46
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih.....	47
D.11.	Beban Lain-lain	48
D.12.	Kegiatan Non Operasional.....	48
D.13.	Pos Luar Biasa.....	49
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	49
E.1.	Ekuitas Awal	49
E.2.	Surplus (defisit) LO	49
E.3.	Koreksi Nilai Persediaan	49
E.4.	Koreksi Aset Tetap.....	50
E.5.	Koreksi atas Beban	50
E.6.	Koreksi atas Pendapatan	50
E.7.	Ekuitas Akhir.....	51
F.	Pengungkapan Penting Lainnya.....	51
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	51
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	51
A.	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap.....	53
B.	Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual	55

DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2017 dan 20166	1
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2017 dan 2016.....	2
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang	24
Tabel 4 Tabel Masa Manfaat.....	25
Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2017	26
Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2017 dan 2016	27
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2017	27
Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2017	28
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016	28
Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016	29
Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016.....	30
Tabel 12 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016.....	31
Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2017 dan 2016.....	32
Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	32
Tabel 15 Rincian Belanja Dibayar di Muka.....	33
Tabel 16 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2017 dan 31 Desember 2016	33
Tabel 17 Rincian Aset Tetap	34
Tabel 18 Rincian Saldo Tanah	35
Tabel 19 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	38
Tabel 20 Rincian Aset Lainnya.....	39
Tabel 21 Rincian Aset tak Berwujud	39
Tabel 22. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2017 dan 2016	40
Tabel 23. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga	41

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Banggai

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kec. Banggai Tengah, Kab. Banggai Laut - Sulawesi Tengah 94791

Telp. 0462-2705706 Fax. 0462-21544 e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banggai yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banggai telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banggai Laut, 14 Juli 2017
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

SABRIN, S.Ag
NIP.197310052002121005

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banggai Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2017 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2017 s.d. 30 Juni 2017 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 2.863.704 atau mencapai 52,35 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 5.470.000,-

Realisasi Belanja Negara pada Semester 1 TA 2017 adalah sebesar Rp. 1.550.079.167 atau mencapai 48,38 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 3.204.145.000,-

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2017 dan 2016 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017			TA 2016
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	5.470.000	2.863.704	52,35	673.686
Belanja Negara	3.204.145.000	1.550.079.167	48,38	1.578.036.404

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 2.001.172.349, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 15.909.300; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 1.981.038.049; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 4.225.000,-

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 15.000.000 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 15.000.000 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp. 1.986.172.349, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 1.986.172.349,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 0,-

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2017 dan 2016 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	30 Juni 2017	31 Desember 2016	Rp.	%
Aset				
Aset Lancar	15.909.300	6.239.850	9.669.450	154,96
Aset Tetap	1.981.038.049	1.898.381.178	82.656.871	4,35
Aset Lainnya	4.225.000	7.900.000	(3.675.000)	(46,5)
Jumlah Aset	2.001.172.349	1.912.521.028	88.651.321	4,63
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	15.000.000	23.607.910	(8.607.910)	(36,46)
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban	15.000.000	23.607.910	(8.607.910)	(36,46)
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	1.986.172.349	1.888.913.118	97.259.231	5,14
Ekuitas Dana Investasi	0	0	0	0
Jumlah Ekuitas Dana	1.986.172.349	1.888.913.118	97.259.231	5,14
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	2.001.172.349	1.912.521.028	88.651.321	4,63

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp. 2.863.704, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 1.452.637.273 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (1.449.773.569). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus/(defisit) sebesar Rp. (182.500) dan surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp. (1.449.956.069).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp. 1.888.913.118 dikurangi Surplus/(Defisit) -LO sebesar Rp. (1.449.956.069) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 1.547.215.300 sehingga Ekuitas Akhir entitas pada tanggal 30 Juni 2017 adalah senilai Rp. 1.986.172.349,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2017, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2017, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya

kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA BANGGAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 DAN 2016
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2017			TA 2016
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	5.470.000	2.863.704	52,35	673.685
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		5.470.000	2.863.704	52,35	673.685
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	2.406.124.000	1.097.253.775	45,60	1.234.612.606
2.	Belanja Barang	B.2.2.	498.021.000	303.275.229	60,90	237.553.798
3.	Belanja Modal	B.2.3.	300.000.000	149.550.000	49,85	105.870.000
	Jumlah Belanja Negara		3.204.145.000	1.550.079.004	48,38	1.578.036.404

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA BANGGAI
NERACA
PER 30 JUNI 2017 DAN 2016
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2017	31 Desember 2016
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	15.000.000	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0	5.166.450
Persediaan	C.1. 3.	909.300	1.073.400
JUMLAH ASET LANCAR		15.909.300	6.239.850
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2. 1.	120.000.000	120.000.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	1.074.982.117	925.432.117
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	2.060.105.383	2.060.105.383
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	2.072.770	2.072.770
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(1.276.122.221)	(1.209.229.092)
JUMLAH ASET TETAP		1.981.038.049	1.898.381.178
ASET LAINNYA	C.4		
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	16.850.000	16.850.000
Aset Lain-Lain	C.4. 2.	175.452.000	175.452.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 3.	(188.077.000)	(184.402.000)
JUMLAH ASET LAINNYA		4.225.000	7.900.000
JUMLAH ASET		2.001.172.349	1.912.521.028
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	0	23.607.910

Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	15.000.000	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		15.000.000	23.607.910
Jumlah Kewajiban		15.000.000	23.607.910
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	C.6		
JUMLAH EKUITAS		1.986.172.349	1.888.913.118
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.001.172.349	1.912.521.028

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA BANGGAI
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2017 DAN 2016
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2017	30 Juni 2016
Kegiatan Operasional			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Perpajakan	D. 1	0	0
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D. 2	2.863.704	673.306
Pendapatan Hibah	D. 3	0	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		2.863.704	673.306
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D. 4	1.079.220.225	1.223.732.606
Beban Persediaan	D. 5	21.140.600	18.038.500
Beban Barang dan Jasa	D. 6	103.086.050	84.948.550
Beban Pemeliharaan	D. 7	96.887.000	74.815.000
Beban Perjalanan Dinas	D. 8	81.735.269	58.296.248
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 9	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 10	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 11	70.568.129	61.079.379
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 12	0	0
Beban Lain-lain	D. 13	0	0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		1.452.637.273	1.520.910.283
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1.449.773.569)	(1.520.236.977)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D. 14	0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D. 15	0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D. 16	(182.500)	(56.620)

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(182.500)	(56.620)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) - LAPORAN OPERASIONAL		(1.449.956.069)	(1.520.293.597)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA BANGGAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2017 DAN 2016
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2017	30 Juni 2016
EKUITAS AWAL	E. 1	1.888.913.118	1.897.387.779
SURPLUS (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL	E. 2	(1.449.956.069)	(1.520.293.597)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR	E. 3	0	(13.000.000)
Penyesuaian Nilai Aset	E. 4	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 5	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 6	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 7	0	(13.000.000)
Koreksi Lain-lain	E. 8	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 9	1.547.215.300	1.577.362.718
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E. 10	97.259.231	44.069.121
Ekuitas Akhir		1.986.172.349	1.941.456.900

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada

Bagan Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Banggai

Visi Pengadilan Agama Banggai adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Banggai Sebagai Lembaga Peradilan Tingkat Pertama Yang Agung”.

Misi Pengadilan Agama Banggai adalah

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Banggai melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Agama Banggai. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Agama Banggai menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 177 Tahun 2016 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Banggai adalah sebagai berikut :

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk

dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

➤ **Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

➤ **Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8.) Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

(9.) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

(10.) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2016 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan No. 177 Tahun 2016 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 30 Juni 2017 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2016.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp. 2.863.704*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp. 2.863.704 atau mencapai 52,35 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 5.470.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Banggai adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.337.000	797.124	59,62
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	4.133.000	2.066.580	50,00
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
	Total Pendapatan	5.470.000	2.863.704	52,35

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp. 2.863.704 atau mencapai 52,35 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 5.470.000. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.190.018 atau 325,07 persen dibandingkan TA 2016.

Hal ini disebabkan karena :

1. Meningkatnya pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan;
2. Meningkatnya penerimaan kembali persekot/uang muka gaji.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2017 dan 2016 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2017	2016	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	797.124	673.306	123.818	18,39
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	2.066.580	0	2.066.580	100
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	380	(380)	(100)
	Total Pendapatan	2.863.704	673.686	2.190.018	325,07

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara : Rp.
1.550.079.004*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Banggai per 30 Juni TA 2017 adalah sebesar Rp. 1.550.079.004 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 48,38% dari anggaran senilai Rp. 3.204.145.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2017		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.406.124.000	1.097.253.938	45,60
Belanja Barang	498.021.000	303.275.229	60,90
Belanja Modal	300.000.000	149.550.000	49,85
Total Belanja Bruto	3.204.145.000	1.550.079.167	48,38
Pengembalian Belanja	0	(163)	0
Total Belanja Netto	3.204.145.000	1.550.079.004	48,38

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) 2017

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp. 27.957.237 atau sebesar 1,77 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya Belanja Pegawai.

Perbandingan realisasi belanja TA 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik (turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	1.097.253.775	1.234.612.606	(137.358.668)	(11,12)
Belanja Barang	303.275.229	237.553.798	65.721.431	27,66
Belanja Modal	149.550.000	105.870.000	43.680.000	41,25
Total Belanja	1.550.079.004	1.578.036.404	(27.957.237)	(1,77)

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp.
1.097.253.775*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Banggai per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 1.097.253.775 dan Rp. 1.234.612.606.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 mengalami penurunan sebesar (11,12) persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Menurunnya Belanja Gaji Pokok Pegawai
2. Menurunnya Belanja Tunj. Fungsional Pegawai
3. Menurunnya Belanja Tunj. Struktural Pegawai
4. Tidak adanya Belanja Uang Lembur Pegawai

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	422.688.800	471.730.000	(49.041.200)	(10,39)
Beban Pembulatan Gaji PNS	5.293	5.499	(206)	(3,74)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	24.782.800	29.918.292	(5.135.492)	(17,16)
Beban Tunj. Anak PNS	8.164.448	8.542.783	(378.335)	(4,42)
Beban Tunj. Struktural PNS	3.240.000	14.120.000	(10.880.000)	(77,05)
Beban Tunj. Fungsional PNS	437.690.000	460.390.000	(22.700.000)	(4,93)
Beban Tunj. PPh PNS	43.831.517	71.606.492	(27.774.975)	(38,78)
Beban Tunj. Beras PNS	23.464.080	21.074.220	2.389.860	11,34
Beban Uang Makan PNS	78.942.000	66.758.000	12.184.000	18,25
Beban Tunjangan Umum PNS	3.145.000	2.925.000	220.000	7,52
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	51.300.000	45.900.000	5.400.000	11,76
Beban Uang Lembur	0	41.642.000	(41.642.000)	(100)
Total Belanja Brutto	1.097.253.938	1.234.612.606	(137.358.668)	(11,12)
Pengembalian Belanja	(163)	0	(163)	0
Total Belanja Netto	1.097.253.775	1.234.612.606	(137.358.831)	(11,12)

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang : Rp.
303.275.229*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Banggai per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 303.275.229 dan Rp. 237.553.798.

Realisasi Belanja Barang TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 27,66 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2016.

Hal ini disebabkan antara lain :

1. Meningkatnya Belanja Barang Operasional
2. Meningkatnya Belanja Barang Persediaan
2. Meningkatnya Belanja Pemeliharaan Perkantoran
3. Meningkatnya Belanja Perjalanan Dinas

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	100.086.000	80.163.000	19.923.000	24,85
Belanja Barang Persediaan	21.159.000	20.304.500	854.500	4,20
Belanja Jasa	3.407.960	4.785.550	(1.377.590)	(28,78)
Belanja Pemeliharaan	96.887.000	74.004.500	22.882.500	30,92
Belanja Perjalanan Dinas	81.735.269	58.296.248	23.439.021	40,20
Total Belanja Brutto	303.275.229	237.553.798	65.721.431	27,66
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	303.275.229	237.553.798	65.721.431	27,66

B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi
Belanja
Modal : Rp.
149.550.000*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Banggai per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 149.550.000 dan Rp. 105.870.000.

Realisasi Belanja Modal TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 41,25 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2016.

Hal ini disebabkan antara lain dikarenakan bertambahnya anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 12 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	149.550.000	105.870.000	43.680.000	41,25
Total Belanja Brutto	149.550.000	105.870.000	43.680.000	41,25
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	149.550.000	105.870.000	43.680.000	41,25

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp. 15.909.300

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.909.300 dan Rp. 6.239.850.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Banggai per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016
Kas di Bendahara Pengeluaran	15.000.000	0
Belanja Dibayar di Muka	0	5.166.450
Persediaan	909.300	1.073.400
Total Aset Lancar	15.909.300	6.239.850

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran:*
Rp. 15.000.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 15.000.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2017	31 Desember 2016
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	15.000.000	0
	Jumlah	15.000.000	0

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja
Dibayar di
Muka: Rp. 0*

Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 5.166.450. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Tabel 15 Rincian Belanja Dibayar di Muka
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2017	31 Desember 2016
1.	Belanja dibayar dimuka	0	5.166.450
	Jumlah	0	5.166.450

C.1.3. Persediaan

*Persediaan:
Rp. 909.300*

Persediaan per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 909.300 dan Rp. 1.073.400. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 16 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2017 dan 31 Desember 2016

No.	Uraian	30 Juni 2017	31 Desember 2016
1	Barang Konsumsi	909.300	1.073.400
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0

9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		909.300	1.073.400

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Rp. 1.981.038.049 Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2017 dan 2016 tersaji sebesar Rp. 1.981.038.049 dan Rp. 1.898.381.178. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 17 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2017	TA 2016	Perubahan
1	Tanah	120.000.000	120.000.000	0
2	Peralatan dan Mesin	1.074.982.117	925.432.117	149.550.000
3	Gedung dan Bangunan	2.060.105.383	2.060.105.383	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	2.072.770	2.072.770	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	3.257.160.270	3.107.610.270	149.550.000
	Akumulasi Penyusutan	(1.276.122.221)	(1.209.229.092)	(66.893.129)
	Nilai Buku Aset Tetap	1.981.038.049	1.898.381.178	82.656.871

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp. 120.000.000 Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 120.000.000 dan Rp. 120.000.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 18 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	Tanah	528	19.09.02.11.4.00031	Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI	Tanah Bangunan Balai Sidang	120.000.000
Jumlah						120.000.000

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 120.000.000 dan Rp. 120.000.000.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp.
1.074.982.117*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.074.982.117 dan Rp. 925.432.117.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2016	925.432.117
Mutasi Tambah	
Peralatan dan Mesin	149.550.000
Mutasi Kurang	
-	0
Saldo per 30 Juni 2017	1.074.982.117
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2017	(838.468.442)
Nilai Buku 30 Juni 2017	236.513.675

Realisasi belanja dalam rangka perolehan aset peralatan dan mesin pada semester I Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 149.550.000,-. Penambahan sebesar Rp. 149.550.000,- merupakan pembelian menggunakan akun belanja modal 532111 yaitu Pembelian Belanja Modal Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi berupa pembelian PC 4 unit, pembelian laptop 1 unit, pembelian printer 6 unit, pembelian CCTV 1 unit, pembelian LCD TV 1 unit,

pembelian UPS 2 unit, pembelian finger scan 1 Unit dan pembelian Projector Infocus 1 unit.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp.
2.060.105.383*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.060.105.383 dan Rp. 2.060.105.383.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	2.060.105.383
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2017	2.060.105.383
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2017	(437.653.779)
Nilai Buku 30 Juni 2017	1.622.451.604

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp.
0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2016	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2017	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2017	0
Nilai Buku 30 Juni 2017	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp.
2.072.770*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.072.770 dan Rp. 2.072.770.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2016	2.072.770
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2017	2.072.770
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2017	0
Nilai Buku 30 Juni 2017	2.072.770

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp. 0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp. (1.276.122.221)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing Rp. (1.276.122.221) dan Rp. (1.209.229.092).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2017 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 19 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	1.074.982.117	(838.468.442)	236.651.675
2.	Gedung dan Bangunan	2.060.105.383	(437.653.779)	1.622.451.604
3.	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4.	Aset Tetap Lainnya	2.072.770	0	2.072.770
	Jumlah	3.137.160.270	(1.276.122.221)	1.861.038.049

Aset Lainnya: Rp. 4.225.000

C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Lainnya per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.225.000 dan Rp. 7.900.000. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Tabel 20 Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2017	TA 2016
1.	Aset tak Berwujud	16.850.000	16.850.000
2.	Aset Lain-lain	175.452.000	175.452.000
	Nilai perolehan Aset Lainnya	192.302.000	192.302.000
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(188.077.000)	(184.402.000)
	Nilai Buku Aset Lainnya	4.225.000	7.900.000

C.4.1. Aset tak berwujud

*Aset tak Berwujud :
Rp. 16.850.000*

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 16.850.000 dan Rp. 16.850.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Aset tak Berwujud
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	Software Komputer	13.000.000
2.	Aset tak berwujud lainnya	3.850.000
	Jumlah Total	16.850.000

C.4.2. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain :
Rp.
175.452.000*

Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 175.452.000 dan Rp. 175.452.000. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Banggai serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2016	175.452.000
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2017	175.452.000

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp. 15.000.000*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 15.000.000 dan Rp. 23.607.910. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Banggai per 30 Juni 2017 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 22. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016
Utang Kepada Pihak Ketiga	0	23.607.910
Uang Muka dari KPPN	15.000.000	0
Jumlah	15.000.000	23.607.910

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada
Pihak Ketiga:
Rp. 0*

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 23.607.910. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Agama Banggai per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 23. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.	Utang kepada pihak ketiga	0	-
	Jumlah	0	

C.5.2. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp. 15.000.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 15.000.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp.
1.986.172.349*

Ekuitas per 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.986.172.349 dan Rp. 1.888.913.118. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2017 terdapat kenaikan nilai kewajiban dan ekuitas sebesar Rp. 97.259.231 (5,14%) dari nilai per 31 Desember TA 2016. Jumlah nilai Kewajiban dan ekuitas pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp. 1.986.172.349 , sedangkan per 31 Desember TA 2016 tercatat sebesar Rp. 1.888.913.118,-

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNPB : Rp. 2.863.704 Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. 2.863.704 dan Rp. 673.306. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNPB per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.337.000	797.124	59,62
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	4.133.000	2.066.580	50,00
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
	Total Pendapatan	5.470.000	2.863.704	52,35

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Rp. 1.079.220.225 Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.079.220.225 dan Rp. 1.223.732.606. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 37 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	427.220.750	471.730.320	(44.509.570)	(10,39)
Beban Pembulatan Gaji PNS	5.157	5.499	(342)	(3,74)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	25.235.995	29.918.292	(4.682.297)	(17,16)
Beban Tunj. Anak PNS	8.345.726	8.542.783	(378.335)	(4,42)
Beban Tunj. Struktural PNS	3.240.000	14.120.000	(197.057)	(77,05)
Beban Tunj. Fungsional PNS	437.690.000	460.390.000	(22.700.000)	(4,93)
Beban Tunj. PPh PNS	43.831.517	71.606.492	(27.774.975)	(38,78)
Beban Tunj. Beras PNS	23.464.080	21.074.220	2.389.860	11,34
Beban Uang Makan PNS	55.742.000	55.878.000	(136.000)	18,25
Beban Tunjangan Umum PNS	3.145.000	2.925.000	220.000	7,52
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	51.300.000	45.900.000	5.400.000	11,76
Beban Uang Lembur	0	41.642.000	(41.642.000)	(100)
Total Beban Pegawai	1.079.220.225	1.223.732.606	(144.512.381)	(11,80)

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan : Rp.
21.140.600*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 21.140.600 dan Rp. 18.038.500. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	21.140.600	18.038.500	3.102.100	17,19
Beban Persediaan pita, cukai		0	0	0
Beban Persediaan Lainnya		0	0	0
Total Beban Persediaan	21.140.600	18.038.500	3.102.100	17,19

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa : Rp.
103.086.050*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 103.086.050 dan Rp. 84.948.550. Beban Barang dan Jasa adalah beban barang dan konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Langganan Daya dan Jasa	3.350.050	4.785.550	(1.435.500)	(30)
Beban Jasa Pos dan Giro	1.483.750	814.500	669.250	82,16
Beban Jasa Konsultan	0	0	0	0
Beban Jasa Profesi	0	0	0	0
Beban Barang dan Jasa Lainnya	98.247.250	79.348.500	18.898.750	0
Total Beban Jasa	103.086.050	84.948.550	18.137.500	21,35

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan:
Rp. 96.887.000*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 96.887.000 dan Rp. 74.815.000. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	63.100.000	34.375.000	28.725.000	83,56
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.787.000	39.629.500	(5.842.500)	(14,74)
Beban Pemeliharaan lainnya	0	810.500	(810.500)	0

Total Beban Pemeliharaan	96.887.000	74.815.000	22.072.000	29,50
--------------------------	------------	------------	------------	-------

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp.
81.735.269*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 81.735.269 dan Rp. 58.296.248. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	81.735.269	58.296.248	23.439.021	40,20
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	81.735.269	58.296.248	23.439.021	40,20

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp. 0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 42 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp.0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Rincian Beban Bantuan Sosial per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp. 70.568.129

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 70.568.129 dan Rp. 61.079.379. Beban Penyusutan

adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

**Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	46.292.075	40.478.325	5.813.750	14,36
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	20.601.054	20.601.054	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	3.675.000	0	3.675.000	100
Jumlah Penyusutan	70.568.129	61.079.379	9.488.750	15,53
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	70.568.129	61.079.379	9.488.750	15,53

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp.0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

**Tabel 45 Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
: Rp.0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

**Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp. (182.500)*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Surplus/(defisit) penyelesaian kewajiban jangka panjang	0	0	0	0
Surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional lainnya	(182.500)	(56.620)	0	0
Penjualan Alat Kantor				
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	(182.500)	(56.620)	(125.880)	(222,32)

D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar
Biasa : Rp. 0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

**Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNPB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal :
Rp.
1.888.913.118*

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.888.913.118 dan Rp. 1.897.387.779.

E.2. Surplus (defisit) LO

*Surplus(defisit)
LO : Rp.
(1.449.956.069)*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. (1.449.956.069) dan Rp. (1.520.293.597). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan :
Rp.0*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.4. Koreksi Aset Tetap

*Koreksi Aset
Tetap : Rp.0*

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.5. Koreksi atas Beban

*Koreksi atas
Beban : Rp.0*

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 50 Rincian Koreksi atas Beban
per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Beban Pegawai	0
Beban Jasa	0
Total Koreksi atas beban	0

E.6. Koreksi atas Pendapatan

*Koreksi atas
Pendapatan :
Rp.0*

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing

sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 51 Rincian Koreksi atas Pendapatan
per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Pendapatan Jasa Pelatihan	0
Pendapatan Lainnya	0
Total Koreksi atas Pendapatan	0

E.7. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir : Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing
Rp. sebesar Rp. 1.986.172.349 dan Rp. 1.941.456.900,-
1.986.172.349

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan Keuangan semester ini maupun pada Laporan Keuangan tahun lalu.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual akan diungkapkan pada Semester II Tahun Anggaran 2017.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Banggai adalah :

1. PT. BRI (Persero) KCP Banggai Kepulauan A/C 0647-01-000023-30-3 a.n. BPG 053 PA BANGGAI yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp. 0. Perubahan nama rekening sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
2. PT. BRI (Persero) KCP Banggai Kepulauan A/C 0647-01-000094-30-4 a.n. BPG 053 PA BANGGAI yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp.0. Perubahan nama rekening sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
3. PT. BRI (Persero) KCP Banggai Kepulauan A/C 0647-01-000406-30-7 a.n. RPL 053 PA Banggai Utk PDT Biaya Perkara yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp.11.740.000. Pembukaan rekening lainnya penampung biaya perkara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga Satuan Kerja.

F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Revisi DIPA Ke-1 berupa Ralat Kode Lokasi yang tidak mengakibatkan perubahan nilai.
2. Revisi POK dari akun belanja pengiriman surat ke langganan Koran, air minum dan alatrumah tangga.
3. Revisi POK berupa belanja barang persediaan konsumsi.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

1. Terdapat ralat koreksi SPM No. 00001 Tanggal 03 Januari 2017 Koreksi dimaksud dikarenakan terdapat perbaikan kode lokasi dari Kab. Banggai Kepulauan menjadi Kab. Banggai Laut.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Terjadi perubahan Pejabat Perbendaharaan pada Semester 1 Tahun 2017 yaitu :

Semula :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Sabrin, S.Ag
Pejabat Pembuat Komitmen	: Sabrin, S.Ag
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Ahmad Shabri Zunnurain, SH
Bendahara Pengeluaran	: Mohammad Fadhil
Bendahara Penerimaan	: Rahmi Aulia Lestari, S.Hi
Staf (PPABP)	: Siti Suryani Tuahuns, A.Ma

Menjadi :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Sabrin, S.Ag
Pejabat Pembuat Komitmen	: Sabrin, S.Ag
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Muhammad Saleh, S.H.I
Bendahara Pengeluaran	: Mohammad Fadhil
Bendahara Penerimaan	: Rahmi Aulia Lestari, S.Hi
Staf (PPABP)	: Siti Suryani Tuahuns, A.Ma

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Banggai

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2017

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A.	Peralatan dan Mesin				
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	236.014.117	236.014.117	0
2.	Alat Kantor	5	116.015.000	76.105.000	39.910.000
3.	Alat Rumah Tangga	5	267.768.500	244.578.700	23.189.800
4.	Alat Studio	5	27.975.000	9.975.000	18.000.000
5.	Alat Komunikasi	5	30.000.000	24.000.000	6.000.000
6.	Peralatan Pemancar	10	19.150.000	12.322.500	6.827.500
7.	Alat Kedokteran	5	1.500.000	1.500.000	0
8.	Komputer Unit	4	238.700.000	138.800.000	99.900.000
9.	Peralatan Komputer	4	137.159.500	94.773.125	42.386.375
10.	Peralatan Olah Raga	3	1.500.000	1.500.000	0
B.	Gedung dan Bangunan				
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	1.791.810.383	396.232.079	1.395.578.304
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	208.460.000	35.438.200	173.021.800
3.	Tugu/tanda Batas	50	59.835.000	5.983.500	53.851.500
C.	Jalan, irigasi dan Jaringan		0	0	0
D.	Aset Tetap Lainnya				
1.	Bahan Perpustakaan Tercetak		2.072.770	0	2.072.770
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan				
1.	Alat Kantor	5	55.875.000	55.875.000	0
2.	Alat Rumah Tangga	5	10.102.000	10.102.000	0
3.	Alat Angkutan Darat Bermotor	5	37.850.000	37.850.000	0
4.	Alat Komunikasi	5	12.750.000	12.750.000	0
5.	Komputer Unit	4	49.900.000	49.900.000	0

6.	Peralatan Pemancar	4	9.250.000	8.875.000	375.000
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		3.313.687.270	1.452.274.221	1.861.413.049

B. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

NIHIL

Tidak Terdapat Informasi Pendapatan Dan Belanja Secara Akrual Yang Dapat Disajikan pada Laporan Keuangan Semester I 2017

(Catatan : Informasi Akrual akan disajikan pada Semester II TA 2017)